



Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Keuangan di Pemerintahan Desa

Rizky Maulana¹, Zulaida Rahmi², Reza Dian Rasyada³, Muazziss Najmi⁴

Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia¹²³⁴

Rizky.ummah.bireuen@gmail.com¹, zulaidarahmi.z@gmail.com², rezadianrasyada@gmail.com³

muazzissnajmi@gmail.com⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 Oktober 2024

Revised: 28 Oktober 2024

Accepted: 01 November 2024

Keywords:

Sistem informasi

Keuangan desa

ABSTRACT

Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan salah satu solusi digital yang dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan sistem informasi keuangan di pemerintah desa dalam hal efisiensi, akurasi, dan kemudahan pelaporan keuangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di beberapa desa di Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan mempengaruhi kelengkapan akurasi data dan transparasi karena sistem telah meningkatkan efisiensi pelaporan, namun masih terdapat kendala pada pelatihan SDM dan ketersediaan infrastruktur TI.

The Village Financial Information System (Siskeudes) is a digital solution developed to improve transparency and accountability in village financial management. This study aims to analyze the effectiveness of the use of financial information systems in village governments in terms of efficiency, accuracy, and ease of financial reporting. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation in several villages in Bireuen Regency. The results show that the financial information system affects the completeness, accuracy, and transparency of data because the system has increased reporting efficiency. However, there are still obstacles in human resource training and the availability of IT infrastructure.

Published by

Impressio : Jurnal Teknologi dan Informasi

Copyright © 2025 by the Author(s) | This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Corresponding Author:

Rizky Maulana

Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

Jl. Kapten Tandean No.3, Dusun Ampang, Kec. Slipi., Kota Kupang, Nusa Tenggara, Indonesia 20218

Email: Rizky.ummah.bireuen@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah mengacu pada upaya dan proses pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi pada tingkat wilayah tertentu, seperti kota, kabupaten, atau desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri yang terdiri dari berbagai kampung, dusun, banjar, dan jorong yang masing-masing merupakan bagian dari kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa (Fairus Adira, 2020). Tujuan pembangunan desa tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup masyarakat, tetapi juga untuk memahami kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana desa, mengembangkan perekonomian lokal dan pemanfaatan desa secara berkelanjutan melalui sumber daya alam itu sendiri (Yumaina, 2015). Pembangunan daerah tidak selalu merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah mungkin lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Tidak meratanya pembangunan di setiap wilayah desa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti alokasi anggaran yang tidak seimbang, perbedaan tingkat infrastruktur awal, serta perbedaan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Desa kulu dan kulu kuta disebabkan

pemerintah desa lebih memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana umum seperti akses jalan menuju sekolah, jalan desa/kelurahan, jalan antar desa/kelurahan/kecamatan, jalan kabupaten, jalan menuju perkotaan, jalan pertanian, jembatan, dan tempat beribadah

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan keharusan dalam era digital saat ini. Pemerintah melalui BPKP dan Kemendagri telah mengembangkan aplikasi **Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** untuk membantu desa dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Namun, implementasi sistem ini tidak selalu berjalan lancar di semua desa. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penggunaannya dalam mendukung tata kelola keuangan desa. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap tata kelola pemerintahan desa semakin meningkat, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa melalui program Dana Desa. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem ini merupakan bentuk inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan desa secara digital, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Diharapkan, sistem ini dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Dikabupaten Bireuen terdapat beberapa desa yang belum mampu mengimplementasikan sistem ini secara optimal. Permasalahan dilokasi penelitian seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami teknologi, kurangnya infrastruktur teknologi informasi (seperti koneksi internet dan perangkat komputer yang terbatas), serta minimnya pelatihan teknis yang menjadi penghambat efektivitas penggunaan sistem informasi keuangan desa. Selain itu, belum ada banyak penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas penggunaan Siskeudes di lapangan.

Dalam penelitian Halimatus Sakdiyah (2022) yang berjudul Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bilaporah Tahun 2021, menemukan bahwa penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bilaporah telah berjalan dengan baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi belum berjalan dengan baik pada tahap pertanggungjawaban karena pemerintah desa dan masyarakat lokal belum melakukan evaluasi bersama. Sedangkan dalam penelitian Benny Syahputra Nasution (2023) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi antara pegawai dan pengurus pemerintahan berjalan dengan baik, tetapi SDM maupun material belum cukup memadai.

Manfaat dari penelitian ini adalah agar sistem informasi keuangan desa dapat berjalan efektif sehingga desa dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan sistem informasi keuangan desa, khususnya dalam aspek efisiensi kerja, akurasi data keuangan, dan kemudahan proses pelaporan. Dengan menganalisis hal ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan dan tantangan dalam penerapan sistem informasi keuangan di lingkungan pemerintahan desa. Faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang analisis efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa karena pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam mendukung pembangunan lokal, seperti infrastruktur, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Karena pentingnya peran ini, maka diperlukan penelitian untuk memastikan pengelolaan desa yang efektif.

URAIAN TEORI

Sistem Informasi

Menurut Jogiyanto (2005), sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan serta pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem informasi pada dasarnya terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia. Sementara itu, menurut Laudon & Laudon (2020), sistem informasi berfungsi sebagai alat bantu dalam meningkatkan

efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan manajerial, serta membantu pencapaian tujuan strategis organisasi.

Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi (Stair & Reynolds, 2017). Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia.

Sistem Informasi Keuangan

Sistem informasi keuangan adalah sistem yang dirancang untuk mengelola proses-proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian transaksi keuangan. Sistem ini dapat berbentuk aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Romney dan Steinbart (2015), sistem informasi akuntansi atau keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip keandalan, relevansi, dan ketepatan waktu dalam penyajian informasi. Dalam konteks pemerintahan desa, sistem informasi keuangan menjadi alat penting untuk mengelola dana desa secara transparan.

Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES)

Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri sebagai alat bantu pemerintah desa dalam menyusun dan mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi ini mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Menurut BPKP (2021), tujuan utama pengembangan Siskeudes adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa serta mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Menurut (BPKP, 2021) Sistem ini dirancang untuk membantu desa dalam pencatatan anggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan secara digital. Dengan adanya Siskeudes, diharapkan proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan.

Konsep Desa

Desa memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan, yang merupakan bagian dari masyarakat hukum Republik Indonesia (UU No. 6 tahun 2014). Desa merupakan kelompok penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan yang memiliki nama, lokasi, dan batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan desa satu sama lain agar lebih mudah untuk membangun sistem pemerintahan (Bastian, 2015). Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dengan bantuan perangkat desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam hal pembangunan, tanggung jawab kepala desa adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat, seperti menyediakan fasilitas umum. Sedangkan dalam hal kemasyarakatan, seperti program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan membina dan mempertahankan nilai sosial dan budaya masyarakat desa tersebut (UU No. 6 tahun 2014). Struktur operasional pemerintahan desa berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala desa, bertanggung jawab atas pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Sekretaris desa biasanya memiliki tiga tugas, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan atau paling sedikit dua tugas, yaitu urusan keuangan dan umum serta perencanaan. Setiap divisi dipimpin oleh kepala divisi. Sekretaris desa berfungsi sebagai bagian dari pemimpin dan membantu kepala desa dalam mengelola pemerintahan.
- c. Pelaksana teknis adalah unsur yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional. Pelaksana teknis biasanya terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan dan paling sedikit terdiri dari dua seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan

- d. Pelaksana kewilayahan adalah komponen pembantu kepala desa sebagai unit tugas kewilayahan. Jumlahnya ditetapkan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa. Ini juga mempertimbangkan karakteristik wilayah kerja, lokasi geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam efektivitas penggunaan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) berdasarkan pengalaman dan persepsi pengguna di beberapa desa di Kabupaten Bireuen. Penelitian dilakukan di tiga desa yang telah menerapkan Siskeudes secara aktif di Kabupaten Bireuen. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan.

Data diperoleh dari data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh sejumlah responden penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari sekumpulan elemen atau objek dan subjek yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang diminati oleh peneliti untuk dipelajari, diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah admin perangkat desa yaitu sebanyak 31 orang. Menurut (Sugiyono, 2014) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi". Peneliti menggunakan Sampling Jenuh, Menurut (Sugiyono, 2014) sampling jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga teknik pengambilan sampel menggunakan sensus dan mengambil sampel dari seluruh populasi (sampel sensus) sebanyak 31 orang. Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji statistic yaitu uji T dan uji F dengan bantuan menggunakan SPSS versi 20.

HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 1 Hasil Estimasi Regresi Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.254	1.364	4.699	.000
	Kelengkapan akurasi data	1.163	.049	.331	.001
	Transparansi	.216	.063	.170	.044

Sumber: Lampiran output SPSS

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 6,254 + 1,163 X_1 + 0,216 X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta sebesar 6,254 menyatakan bahwa jika nilai varibel independen dianggap nol (kelengkapan akurasi data (X_1) = 0 dan transparansi (X_2) = 0, maka nilai sistem informasi keuangan desa sebesar 6,254.
2. Koefisien kelengkapan akurasi data memberikan nilai sebesar 1,163 yang berarti bahwa jika kelengkapan akurasi data semakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap maka maka sistem informasi keuangan desa akan mengalami peningkatan sebesar 1,163, peningkatan satu satuan pada kelengkapan akurasi data akan meningkatkan skor sistem informasi keuangan desa sebesar

1,163 poin, yang berarti perbaikan kualitas data memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding transparansi.

3. Koefisien transparansi memberikan sebesar 0,216 yang berarti bahwa jika Transparansi mengalami peningkatan dengan asumsi variabel lain tetap maka sistem informasi keuangan desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,216. peningkatan satu satuan pada transparansi akan meningkatkan skor sistem informasi keuangan desa sebesar 0,216 poin, yang berarti transparansi memiliki dampak yang tidak terlalu besar dibanding kelengkapan akurasi data.

Pengujian Hipotesis

Uji F (Pengujian Hipotesis Secara Simultan)

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Secara Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.008	2	16.004	10.316	.000 ^a
	Residual	145.827	94	1.551		
	Total	177.835	96			

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel anova diatas dapat dilihat nilai Fhitung hasil pengolahan data sebesar 10,316 dengan nilai signifikansi < 0,000 dan nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari F tabel pada = 0.05 maka, diperoleh nilai F tabel sebesar 3,09. Karena F hitung (10,316) lebih besar dari F tabel (3,09) maka diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kelengkapan akurasi data dan transparansi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap system informasi desa.

Dari hasil penelitian untuk uji F dapat disimpulkan bahwa kelengkapan akurasi data dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi keuangan desa. Dimana sistem informasi keuangan desa dapat berjalan dengan baik jika kelengkapan akurasi data dan transparansi diterapkan dengan baik di Kabupaten Bireuen.

Uji t (Uji Hipotesis Secara Parsial)

Tabel 4. 12 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.411	1.364	4.699	.000
	Kelengkapan akurasi data	1.163	.049	.331	.292
	Transparansi	.216	.063	.170	3.693

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan table diatas diperoleh nilai Nilai ttabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1.985 yang diperoleh dari tabel t pada = 0.05 dan derajat bebas 95 untuk pengujian dua pihak.

Pengaruh kelengkapan akurasi data terhadap system informasi keuangan Desa

Berdasarkan hasil perhitungan untuk t hitung thitung sebesar 3,292 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 maka diputuskan untuk menolak Ho1 sehingga Ha1 diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa

kelengkapan akurasi data memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sistem informasi keuangan desa.

Pengaruh transparansi Terhadap System Informasi Keuangan Desa

Dari hasil penelitian diperoleh nilai thitung variabel transparansi sebesar 3,693 dengan nilai signifikansi sebesar 0,044. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1.985. Karena nilai thitung sebesar 3,693 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 maka diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_1 diterima. Artinya bahwa transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sistem informasi keuangan desa.

Koefisien Determinasi

Hasil estimasi dengan menggunakan SPSS versi 21.0 didapat hasil sebagai berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Determinasi Variabel
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Error of the Estimate	Std.		Durbin-Watson
					Sig. F Change	Durbin-Watson	
1	.424 ^a	.180	.163	124.553	.000	1.549	

Nilai R pada tabel diatas menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (kelengkapan akurasi data dan transparansi) secara simultan dengan sistem informasi keuangan desa. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel independen (kelengkapan akurasi data dan transparansi) memiliki hubungan yang kuat/erat dengan sistem informasi keuangan desa. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,424 berada diantara 0,40 hingga 0,60 yang termasuk dalam kriteria korelasi yang cukup. R square sebesar 0,18 yaitu kelengkapan akurasi data dan sistem informasi keuangan desa sebesar 18 % mempengaruhi sistem informasi keuangan desa dan sisanya sebesar 82% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kelengkapan Akurasi Data Terhadap Sistem Informasi Keuangan Desa

Kelengkapan akurasi data adalah dua aspek penting dalam manajemen data yang saling berkaitan. Kelengkapan data memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia dan tidak ada yang terlewatkan, sementara akurasi data menjamin bahwa informasi yang tersedia benar dan sesuai dengan realitas. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kelengkapan akurasi data berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi keuangan desa. Dengan nilai sebesar 3,292 dengan nilai signifikansi sebesar 0,01. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1,985 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 95 untuk pengujian dua pihak. Karena nilai thitung 3,292 lebih besar dari ttabel 1,985 maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_1 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95%.

Transparansi Terhadap Sistem Informasi Keuangan Desa

Transparansi adalah keadaan terbuka dan dapat dilihat secara keseluruhan, terutama dalam konteks informasi atau proses yang seharusnya diketahui oleh publik atau pihak-pihak terkait. Dalam pemerintahan, transparansi berarti keterbukaan dalam penyampaian informasi terkait kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian Transparasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi keuangan desa. Prinsip transparansi yang dilakukan di Desa Sei Kulu dengan cara menyebarkan anggaran dan kegiatan yang dilakukan pada tempat-tempat strategis yang dapat diakses melalui website desa, pemasangan baliho, dan papan info grafis. Partisipasi berarti keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, ikut serta dalam kegiatan pembangunan, dan ikut memanfaatkan dan

menikmati hasil pembangunan. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan suatu respon dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

Dilokasi penelitian kepala desa dan perangkat desa diberi kepercayaan oleh pemerintah dan masyarakat desa sebagai prinsipal dalam pengelolaan keuangan desa. Selain memiliki kepentingan sendiri dan kelompoknya, agen cenderung melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal karena mereka tidak memiliki rasionalitas dan penghindar risiko. Kemampuan aparat desa sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Kepemimpinan kepala desa juga berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Kelengkapan Akurasi Data dan Transparansi Terhadap Sistem Informasi Keuangan Desa

Secara teori, kelengkapan dan akurasi data merupakan komponen penting dari kualitas informasi dalam sistem informasi keuangan desa. Sementara itu, transparansi merupakan prinsip tata kelola yang hanya dapat dijalankan apabila informasi yang disampaikan kepada publik adalah hasil dari data yang lengkap dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kelengkapan akurasi data dan Transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi keuangan desa.

PENUTUP

Kelengkapan akurasi data mempunyai pengaruh yang positif dan disignifikan secara parsial terhadap sistem informasi keuangan desa, Transparansi berpengaruh positif dan simultan terhadap sistem informasi keuangan desa Kabupaten Bireuen. Sedangkan kelengkapan akurasi data dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap sistem informasi keuangan desa kabupaten bireuen sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kelengkapan akurasi data dan transparansi akan memperbaiki efektivitas sistem informasi keuangan desa. Tingkat efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa termasuk dalam kriteria sangat efektif dan efektif karena dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah desa mengatur pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan keuangan desa juga sudah efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban bersifat transparansi. Jika dikaitkan dengan teori keagenan, hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai pihak prinsipal dikatakan sangat baik.

REFERENSI

- Arianto & Kahpi, A. (2022terbitan lengkap perlu dicek). *Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes)*. Alauddin Law Development Journal.
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Bastian, Indra. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga
- Candrawati, D., & Alfian, A. (2024). *Efektivitas penerapan Siskeudes dalam penyusunan laporan keuangan desa: studi kasus di Kecamatan Pare*. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 7(1), 141–150.
- Indriani, N., Hardi, R., & Khaerah, N. (?). *Penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Garing, Kabupaten Gowa*. VILLAGE: Journal Rural Development and Government Studies.
- Setiowati, M., & Agustina, I.F. (?). *Efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pelaporan keuangan di Desa Permisan, Kecamatan Jabon*. Journal Publicuho.
- Junika Sari, N.K.A.S., & Hutnaleontina, P.N. (2023). *Analisis efektivitas penerapan sistem keuangan desa di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung*. Hita Akuntansi dan Keuangan, 4(2), 295–305.
- Nurhidayati, S., Syaifullah, S., & Muslim, M. (2025). *Dampak penggunaan aplikasi Siskeudes terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik, 6(1).
- Preswari, R., & Ratnawati, D. (2025). *Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), 4(2).

- Palahiyah, S.F., Febriyani, S., & Sandra, M. (2025). *Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pelatihan, dan peran pendampingan desa terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes di 29 kecamatan Kabupaten Serang*. *Economist: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1).
- Ramesti, T.B., Nuraina, E., & Sulistyowati, N.W. (202?). *Evaluasi implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes)*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPG)*.
- Ramadhan, B., Mulyani, H.T.S., & Medinal. (2023). *Analisis implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan di Desa Pangkal Buluh*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, 10(2), 29–36.
- Setiowati, M., & Agustina, I.F. (?). *Efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pelaporan keuangan di Desa Permisian, Kecamatan Jabon*. *Journal Publicuh*
- Sugiyono, M. (2014). Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D cet. Ke-19, Bandung: Alfabetia.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabetia. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabetia.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabetia. Sujarweni, V. W. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah